

# SEMINAR HASIL LAPORAN PENYUSUNAN *BACKGROUND STUDY* RPJPN 2025-2045

Direktur Politik dan Komunikasi  
Jumat, 16 Desember 2022



## Latar Belakang

- Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan esensial sepanjang proses konsolidasi demokrasi menuju demokrasi substansial.
- Masih kuatnya nilai dan sikap anti pluralisme, dan menjadikan warga sebagai obyek untuk kepentingan elit (oligarki).
- Masih lemahnya partisipasi masyarakat dan media dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan.
- Implementasi keterbukaan informasi publik masih timpang antar K/L/D. Komitmen serta standarisasi tata kelola komunikasi dan informasi publik masih belum maksimal.

## Maksud

- *Background study* ini merupakan studi pendahuluan sebagai salah satu rujukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045.

## Tujuan

- Mengidentifikasi permasalahan, visi, dan arah kebijakan sebagai acuan penyusunan RPJPN 2025-2045 Bidang Politik dan Komunikasi secara sistematis, objektif, dan rasional dari berbagai sumber informasi yang kredibel.

# Visi Indonesia 2045 Sebagai Pedoman

## Politik Dalam Negeri

Kualitas demokrasi Indonesia terus ditingkatkan. Demokrasi yang saat ini lebih bersifat prosedural dan formalitas diarahkan pada demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat dengan terwujudnya lembaga perwakilan serta sistem presidensial yang efektif.



## POLITIK DALAM NEGERI: TAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN 2045

DEMOKRASI PROSEDURAL  
- TRANSAKSIONAL

### Penguatan Kapasitas Parpol dan Pembangunan Pranata Politik

- Penguatan fungsi parpol sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui lembaga perwakilan
- Intervensi anggaran dan kebijakan negara pada parpol
- Peran perempuan

2015

### Revitalisasi Pancasila

- Pendidikan politik dan kewarganegaraan
- Merespons politik aliran yang kontra produktif pada demokrasi
- Merespons ideologi terorisme dan radikalisme

2025

### Penguatan Demokrasi di Daerah dan Peningkatan Partisipasi Politik

- Kepala Daerah yang efektif dan penguatan lembaga perwakilan daerah
- Penguatan Masyarakat Sipil di Daerah (*Democracy Trust Fund*)
- Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

2035

### Pemantapan Per UU Politik

- Penguatan peran lembaga-lembaga demokrasi
- Peran lembaga perwakilan dan Presiden

### Lembaga Perwakilan yang Efektif

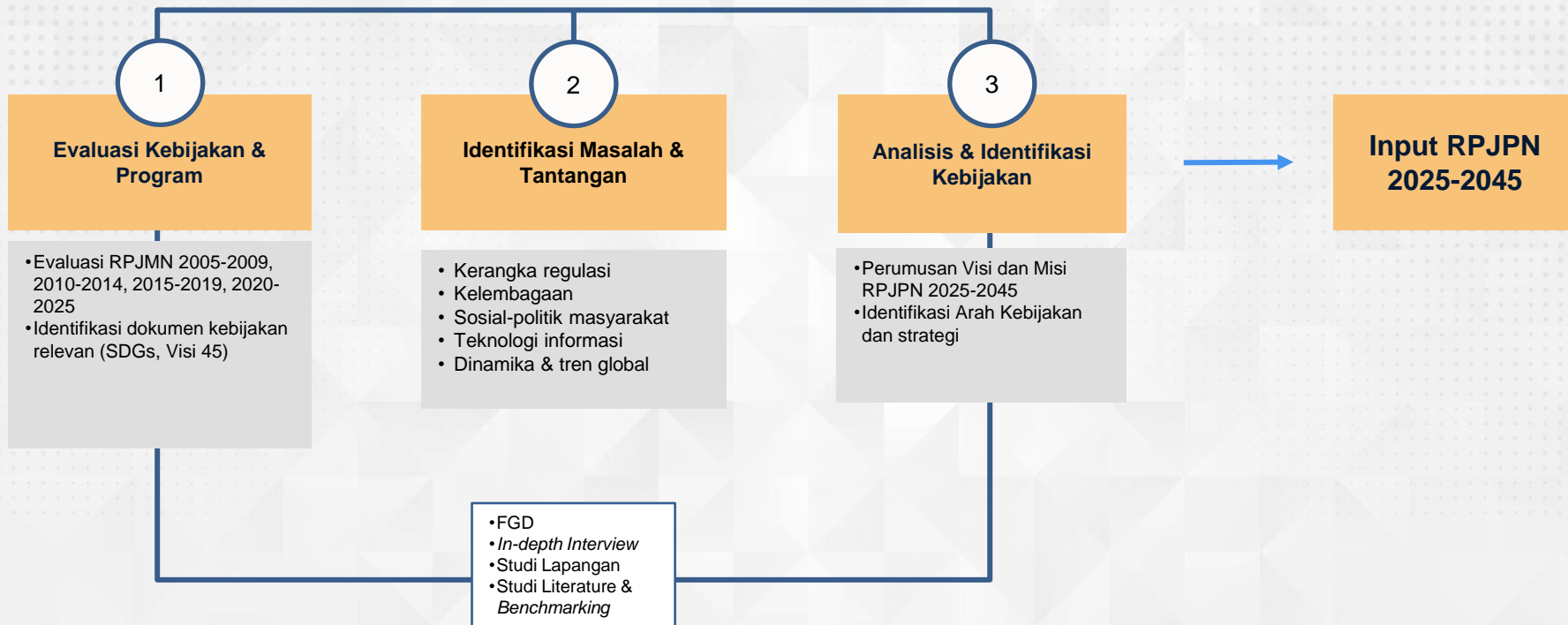
- Perwujudan Sistem Dua Kamar yang Efektif
- Sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik
- Mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan

2045

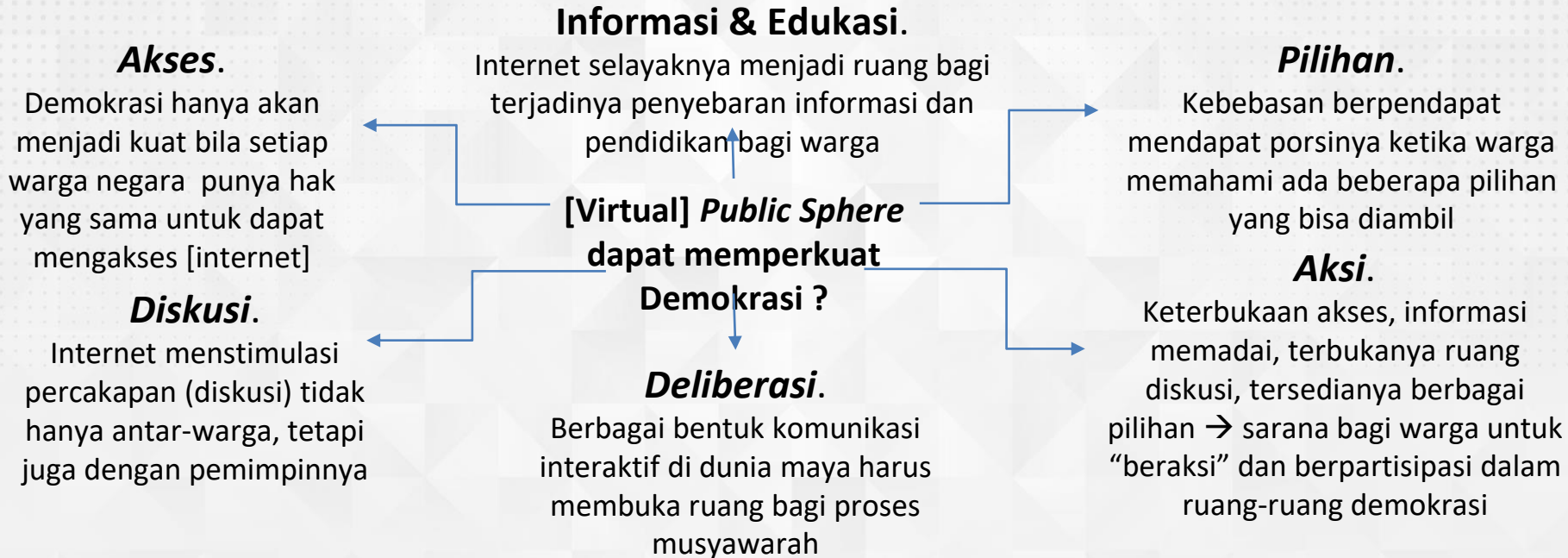
### Sistem Presidensial yang Efektif

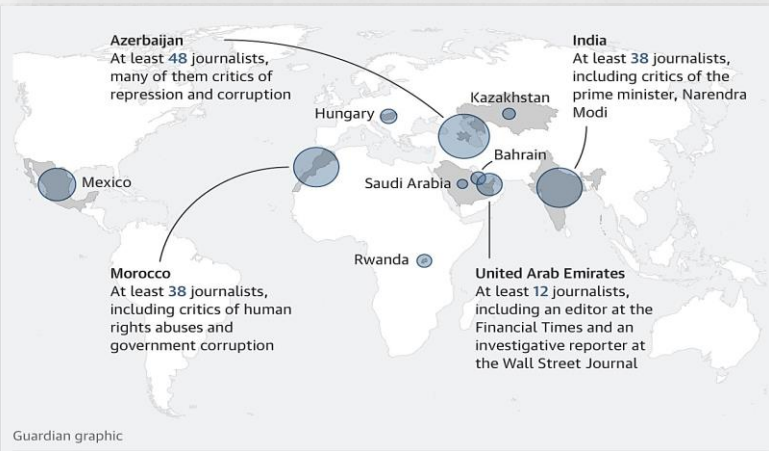
- Presiden yang kuat dan efektif
- Presiden yang akuntabel

DEMOKRASI  
SUBSTANSIAL

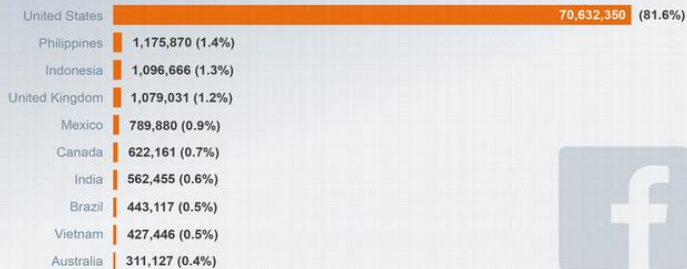


Ruang Publik (*Public Sphere*) → Dari Warung Kopi ke Dunia Maya  
Dari warung kopi di London dan salon di Perancis bertransformasi ke jagad maya





## People whose Facebook data was improperly shared by Cambridge Analytica



## Pegasus Spyware

Kemunculan *Citizen Surveillance Technology* untuk mengawasi aktivitas masyarakat dan membongkar lawan politik



## Cambridge Analytica

Penyalahgunaan Data Pribadi dan pelanggaran privasi untuk kepentingan politik (kampanye hitam dan propaganda)

## Mengaburkan Relasi Kuasa

*Digitally networked surveillance capitalism* menciptakan sistem kelas yang tidak demokratis yang mengadu kontroler dengan yang dikontrol

## Memperkuat yang Berkuasa

Teknologi digital semakin memperkuat pihak yang menguasai teknologi dan data untuk kepentingan tertentu

## Melemahkan Jurnalisme

Fenomena *information overload* yang memaksa jurnalis bekerja cepat yang akibatnya mengurangi verifikasi fakta dan filterisasi konten

## Regulasi yang Tidak Mumpuni

Kecepatan, ruang lingkup, dan dampak manipulasi teknologi sulit diikuti oleh regulasi

- **Konsolidasi Demokrasi** : proses yang menentukan terwujudnya demokrasi di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia

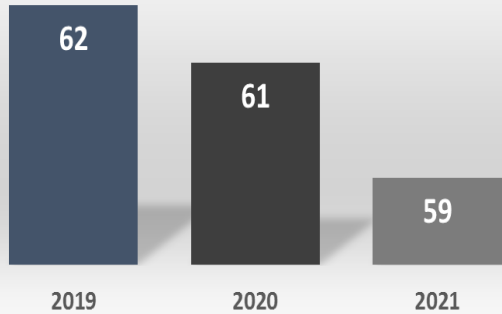
### Tantangan utama pembangunan demokrasi :

1. Tingginya biaya politik (Indonesia peringkat 3 di dunia – prevalensi politik uang)
2. Besarnya pengaruh kelompok kepentingan (dominasi oligarki)
3. Menguatnya politisasi isu-isu identitas (SARA) dalam kegiatan politik elektoral
4. Masih lemahnya partisipasi masyarakat dan media dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
5. Adanya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil (antara lain: kebebasan berpendapat/otoritarianisme digital)
6. Berkembangnya praktik diskriminasi dan intoleransi di Indonesia yang memicu konflik



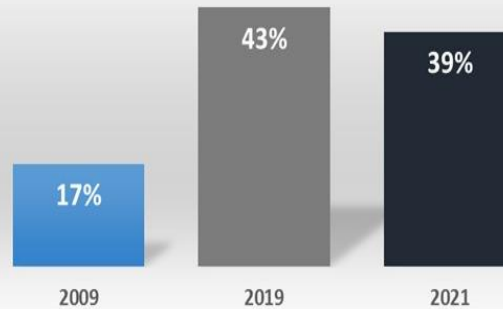
- Demokrasi Indonesia termasuk mengalami dinamika pada paruh kedua reformasi – Indeks FH dan EIU

Skor Kebebasan



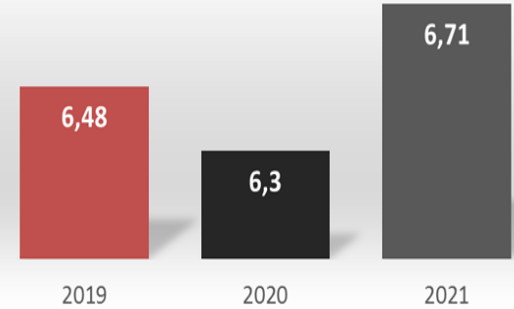
Dalam 3 tahun terakhir poin Indonesia turun, dan mencapai poin terendah pada 2021 – *Freedom House*

Takut Bicara Politik



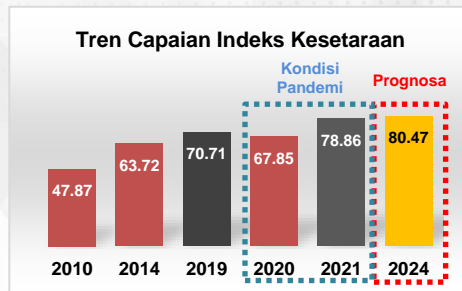
Ada kecenderungan meningkatnya persentase masyarakat yang takut bicara politik (mujani & liddle, 2021 - *Journal of Democracy*)

Indeks Demokrasi EIU

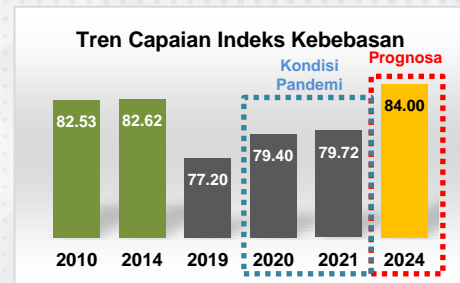


Tren demokrasi Indonesia mencapai poin terendah pada tahun 2020 – *Economist Intelligence Unit*

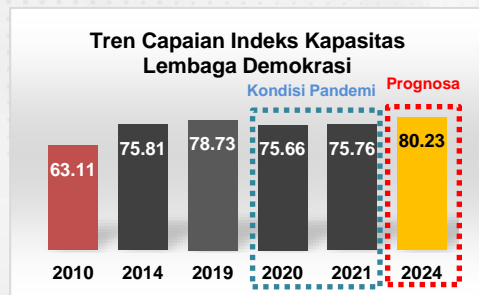
- Indikator Kinerja Pembangunan Politik dan Demokrasi Tahun 2005-2025



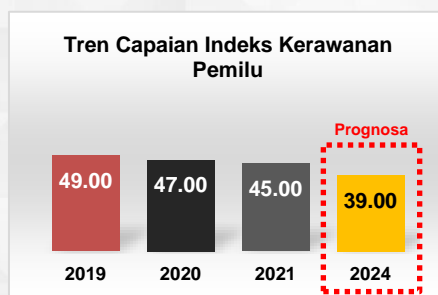
Tren pemenuhan hak politik meningkat, namun perlu dibarengi dengan peningkatan kedewasaan dalam berpolitik



Capaian indeks kebebasan mengalami fluktuasi yang mengindikasikan kebebasan sipil yang belum terjamin sepenuhnya.



Capaian indeks kapasitas lembaga demokrasi mengalami tren meningkat, namun peran parlemen dan parpol masih belum optimal.

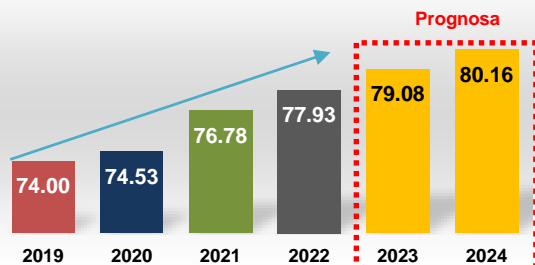


Meski berada pada kategori sedang, IKP pada tahun 2021 belum menunjukkan penurunan signifikan yang disebabkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam pemilu.

## Tantangan

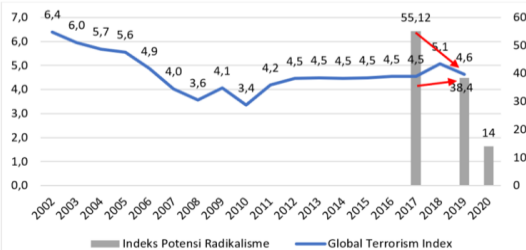
- Hambatan dalam menjamin kebebasan individu, kelompok, dan masyarakat untuk dapat mandiri (otonom) sehingga mampu menentukan kepentingan sendiri;
- Jaminan kesetaraan memperoleh atau mengakses sumber daya dan menghilangkan diskriminasi dan eksklusi;
- Kapasitas lembaga demokrasi untuk memastikan dan menjamin kesetaraan dan kebebasan (*responsive*).

## Tren Capaian Indeks Aktualisasi Pancasila



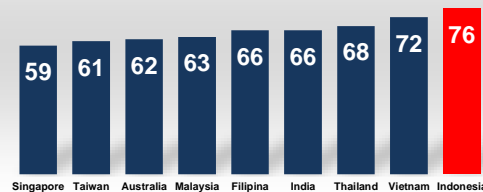
Capaian Indeks Aktualisasi Pancasila selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan secara konsisten.

## Global Terrorism Index dan Indeks Potensi Radikalisme



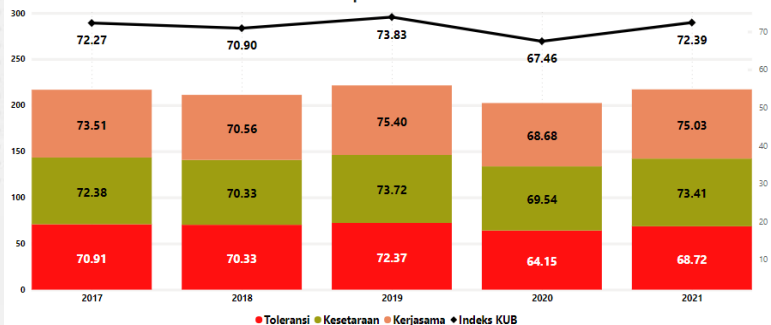
Tingkat **potensi radikalisme yang menurun** tajam belum tentu berkaitan erat dengan penurunan potensi terjadinya tindakan terorisme.

## Digital Civility Index in Asia Pacific 2020



Survei DCI tahun 2020 menempatkan Indonesia diposisi terendah di antara 9 negara di Asia Pasifik. Skor ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angkanya, maka tingkat kesopanan makin rendah.

## Tren Capaian Indeks KUB



Tren indeks KUB sejak tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa skornya bersifat **fluktuatif**. Dari ketiga indikator yang dinilai, indikator **toleransi selalu mendapatkan angka terendah** selama lima tahun berturut-turut dibandingkan kesetaraan dan kerjasama.

## Tantangan

- Tindakan radikalisme, ekstrimisme, terorisme, separatisme, primordialisme menjadi ancaman terhadap pelaksanaan demokrasi dan wawasan kebangsaan;
- Permasalahan diskriminasi dan intoleransi juga masih sering terjadi di Indonesia terutama yang berbasis pada agama, jender, dan etnis;
- Skor Indonesia dalam survei *digital civility index* 2020 berada di peringkat 29 dari 32 negara, ini menunjukkan bahwa keadaban digital masyarakat Indonesia masih rendah yang disebabkan karena hoaks, ujaran kebencian, penipuan, perundungan, penyebaran informasi pribadi, dan pelecehan yang terjadi di ruang digital.

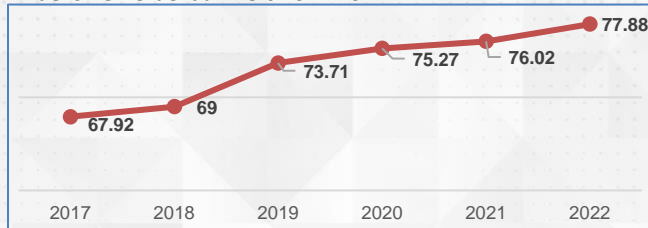
## Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021-2022

	2021	2022
<b>NASIONAL</b>	<b>71,37</b>	<b>74,43</b>
Fisik & Politik	70,41	74,53
Ekonomi	68,89	74,84
Hukum	74,62	73,98

Sumber: [komisiinformasi.go.id](http://komisiinformasi.go.id)

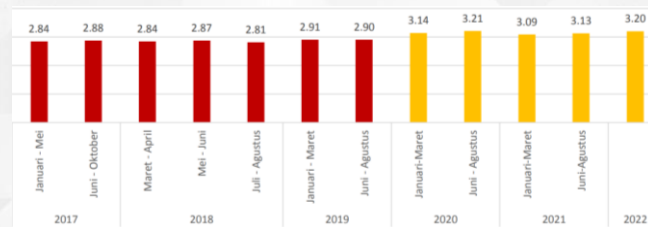
- Masih tingginya **ketimpangan kualitas implementasi keterbukaan informasi antar daerah**. Belum adanya standarisasi sistem serta kurangnya kapasitas SDM.
- Hasim monev KIP 2021: jumlah badan publik yang **informative (84/24,9%) political will, penyediaan informasi dasar, inovasi yang belum tepat sasaran** menjadi masalah utama.

## Indeks Kemerdekaan Pers 2017-2022



- Indeks Kemerdekaan Pers 2022 (77,88 –cukup bebas) mengalami **kenaikan**, namun **kekerasan dan ppremanisma** terhadap jurnalis masih ada, **rendahnya kesejahteraan** jurnalis serta kesetaraan akses bagi kelompok **rentan dan disabilitas** masih menjadi masalah.

## Indeks Kualitas Penyiaran TV 2017-2022



- Terjadi peningkatan atas kualitas TV Indonesia untuk tahun 2022 (3,20 -kategori baik) namun **infotainment (2,80)**, dan **sinetron (2,70)** masih konsisten mendapatkan nilai terendah dibawah 3.
- UU Ciptaker mengubah **landscape** penyiaran Indonesia khususnya isu **demokratisasi penyiaran**.

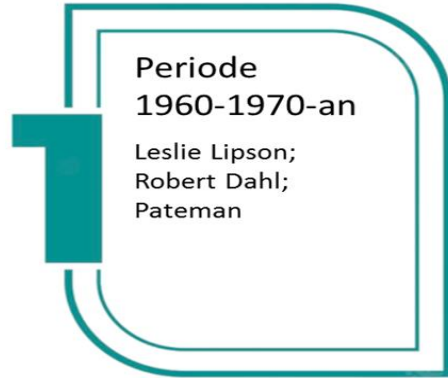
## Tantangan

- Tuntutan implementasi teknologi informasi untuk **aplikasi transparansi & interaksi publik** seperti *artificial intelligence, chatbots, digital assistants*, dan *augmented reality*
- Meningkatnya penggunaan **AI-generated content** yang bisa **dieksploitasi** untuk **memproduksi dan menyebarkan konten-konten negatif** di internet
- Meningkatnya control access** oleh platform terhadap konten dan audience yang semakin **mendikte pendekatan isi berita**
- Model bisnis yang lebih bebas dan lebih komersial**, melemahkan profesi jurnalis dan membuat media *outlet* lebih rentan terhadap kepentingan ekonomi-politik
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia jurnalisme**, perlunya kolaborasi untuk menjaga akurasi dan ketepatan informasi
- Universal content supermarket** – TV konvensional kalah total, sehingga terjadinya banjir **konten digital tanpa filter**.

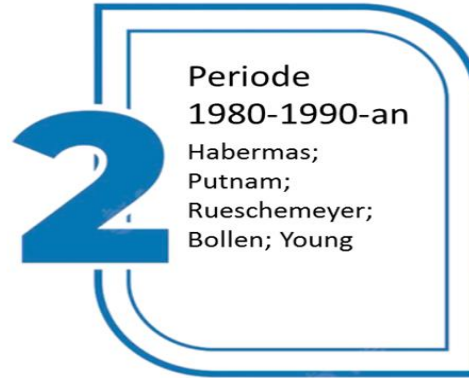


# KERANGKA PEMIKIRAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

## Proposisi Dalam Teori Demokrasi



- Demokrasi perwakilan ditopang oleh pemilu demokratis;
- Institusi demokratik yang kuat;
- Persebaran kekuasaan; partisipasi politik warga yang efektif;
- Partisipasi demokratis didominasi oleh para elit



Partisipasi warga; Deliberasi; Persebaran dan perimbangan kekuasaan; Kebebasan politik dan kedaulatan warga; Inklusi dan demokrasi; Politik perbedaan (demokrasi plural-kultural).



Demokrasi lintas batas negara (lokal dan global); Kebebasan dan hak sipil; Masyarakat multikultural; Partisipasi warga, Inklusifitas dan kesetaraan antar kelompok warga; Perimbangan kekuasaan dan demonopolisasi sumber daya kekuasaan; Demokrasi sebagai ruang kontestasi; Demokrasi deliberatif; Paradoks demokrasi

## Demokrasi Perwakilan Penuh (Hobbes)

- Kedaulatan dapat dialihkan
- Partisipasi dapat diwakilkan

- Individu harus memiliki keinginan menyerahkan hak-hak mereka dalam mengatur-diri (self- government) kepada satu otoritas yang memiliki kekuasaan penuh, yang berwenang melakukan tindakan atas nama mereka.
- Hobbes lebih mementingkan pada perlindungan-diri manusia sebagai tujuan utama, dan masyarakat harus diatur untuk mencegah hasrat kekerasan dalam diri manusia, dan memandang perlunya konsentrasi kekuasaan hanya pada satu tempat, yang ia sebut the Sovereign.

## Demokrasi Perwakilan (Locke)

- Kedaulatan tidak dapat dialihkan
- Partisipasi dapat diwakilkan

- Individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan;
- Keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemampuan dan kemauan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu.
- Susunan aparat pemerintah bukan merupakan pemindahan seluruh hak-hak subyek kepada domain politik.
- Kedaulatan individu: "life, liberty and estate"
- (kehidupan, kebebasan dan hak milik).

## Demokrasi Langsung (Rousseau)

- Kedaulatan tidak dapat dialihkan;
- Partisipasi tidak dapat diwakilkan

- Kebebasan dan otonomi kolektif yang hanya dapat dihidupkan dalam sistem pemerintahan-kolektif mandiri (collective self-rule).
- Individu yang bermasyarakat menciptakan hukumnya sendiri, dan kemudian mengatur hidupnya secara kolektif
- Individu tunduk pada hukum, bukan pada individu lain. Hukum haruslah dibuat oleh seluruh warga secara kolektif.

## Dimensi Demokrasi

### Konstitusional

Sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kerangka hukum untuk menjamin infrastruktur demokrasi, khususnya kebijakan politik tertentu

### Prosedural

Menekankan keabsahan proses demokrasi. Pendekatan ini berfokus pada proses pemilu yang jujur dan adil

### Orientasi Proses

Menekankan pada kualitas partisipasi publik yang efektif, kesempatan yang sama bagi seluruh elemen masyarakat, akses dan kontrol publik dalam membuat kebijakan strategis.

### Substantif

Proses demokrasi dikondisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan substantif masyarakat, seperti: seperti kesejahteraan sosial, keadilan, keamanan dan perdamaian



Presiden Soekarno  
mencanangkan sistem  
demokrasi terpimpin sebagai  
demokrasi khas Indonesia.  
Penyelenggaraan pemerintahan  
justru dilaksanakan dengan  
kekuasaan sentralistik dan  
berpusat pada figur Soekarno

## Demokrasi Terpimpin (Orla)

Munculnya tata kehidupan  
demokratis: munculnya  
banyak parpol baru,  
kebebasan berserikat,  
berpendapat, kebebasan pers,  
dsb.

## Reformasi (Transisi Demokrasi)

Terbangunnya budaya dan  
kepribadian politik demokratik.  
Elemen: inisiatif rasional politik,  
kesantunan politik, disposisi  
resiprositas toleransi, fleksibilitas  
dan *open mindness*, komitmen,  
kejujuran, dan keterbukaan

## Demokrasi Substansial

1945-1959

## Demokrasi Liberal/ Parlementer

Kegagalan penerapan  
demokrasi ala Barat yang  
bertentangan dengan jati  
diri dan budaya bangsa  
Indonesia.

1959-1965

## Demokrasi Pancasila (Orba)

Mengedepankan sistem  
presidensial dimana UUD 1945  
dan Pancasila sebagai usaha  
untuk mengembalikan  
penyelewengan terhadap UUD  
1945 yang terjadi pada masa  
Demokrasi Terpimpin.

1965-1998

1998-2005

## [Konsolidasi] Demokrasi Prosedural

Ciri utama demokrasi  
terkonsolidasi, yakni negara  
berlandaskan hukum (*rule of  
law*), birokrasi yang profesional  
dan netral, serta masyarakat  
sipil, masyarakat politik, dan  
masyarakat ekonomi yang  
otonom

2005-2025

2025-2045

## PRINSIP DEMOKRASI SUBSTANSIAL

1. Ruang publik yang inklusif, berkeadilan dan efektif
2. Akuntabilitas lembaga demokrasi yang berorientasi kepentingan rakyat
3. Hasil pemilu yang berbasis pada legitimasi publik
4. Interaksi publik yang sehat dalam berdemokrasi
5. Partisipasi masyarakat sipil yang efektif dan lebih bernilai
6. Adanya kesempatan yang sama di masyarakat dalam memperoleh, memproses, dan memanfaatkan sumber daya di berbagai sektor

### Participatory

- Melampaui fakta sederhana adanya pemungutan suara
- **Keterlibatan warga** dalam proses kebijakan publik
- Interaksi timbal balik antar individu melalui kebiasaan sosial
- Pendidikan terencana & sistematis sebagai prasyarat

### Liberal

- **Kebebasan** dilindungi konstitusi dan mendorong partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- Sebagian besar penduduk berpartisipasi dalam pemilihan umum
- Aturan main institusional juga ditetapkan.

### Deliberatif

- Setiap kebijakan publik diuji melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik dengan keberadaan "**ruang publik**"
- Keputusan dihasilkan dari proses diskusi yang inklusif.

### Kemitraan

- **Kesetaraan** hanya dapat terwujud melalui desain kelembagaan yang mendistribusikan kekuasaan



# TEMUAN PENTING

## Sub Bidang Politik

- **Perbaikan regulasi kepemiluan untuk meningkatkan kualitas demokrasi prosedural**
  - Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemilu
  - Mendorong penegakan regulasi dan sanksi yang kuat bagi pelanggaran politik uang, politisasi isu-isu identitas, dan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada
  - Mendorong terwujudnya sistem informasi penunjang kepemiluan
- **Penguatan kelembagaan demokrasi**
  - Mendorong terwujudnya lembaga perwakilan berbasis konsep Parlemen Modern
  - Mendorong pembaharuan regulasi sistem kepartaian untuk memperkuat efektivitas sistem presidensialisme
  - Meningkatkan kualitas partai politik dengan membuat parameter kinerja partai politik serta mendorong rekrutmen politik yang lebih terbuka
  - Meningkatkan literasi politik yang mampu meningkatkan kesadaran politik di masyarakat dan mendorong partisipasi politik yang lebih bermakna
- **Penguatan peran masyarakat sipil dan dukungan keberlanjutan**
  - Dukungan sumberdaya bagi keberlangsungan organisasi masyarakat sipil
  - Memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil

## Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan

- **Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional**
  - Mendorong keterlibatan komunitas dalam pendidikan dan pembudayaan Pancasila di masyarakat
  - Meningkatkan *good governance* sebagai penerjemahan Pancasila
  - Peningkatan kerjasama Dunia Usaha/Dunia Industri dalam pembudayaan Pancasila melalui CSR
- **Penguatan ketahanan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional**
  - Mendorong regulasi BPIP sebagai penguatan kelembagaan Pancasila
  - Penguatan *civic education* serta peran dan fungsi Forum Keragaman Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan di masyarakat
  - Meningkatkan program pembumian Pancasila pada generasi muda dan program revolusi mental

## Sub Bidang Komunikasi dan Media

- **Tata kelola Informasi dan komunikasi publik yang dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat**
  - Integrasi fungsi pelayanan informasi public dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
  - Adaptasi teknologi informasi (*chatbots, AI, digital assistant*) untuk interaksi secara personal dengan masyarakat
  - Implementasi tata kelola informasi dan data yang terbuka dan terintegrasi yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan solusi masalah-masalah publik
- **Penguatan kolaborasi dengan platform digital untuk memerangi disinformasi dan konten negatif**
  - Mendorong implementasi etika pemanfaatan data oleh platform digital
  - Mendorong regulasi perlindungan privasi untuk pemanfaatan komersil oleh platform digital
  - Penguatan regulasi moderasi konten online platform serta fasilitasi moderasi konten berbasis komunitas dan masyarakat sipil
- **Mendorong peningkatan kesejahteraan jurnalis dan perusahaan pers yang lebih sustainable**
  - Mendorong regulasi *Publisher Rights*
  - Diversifikasi spesialisasi perusahaan pers
  - Peningkatan kapasitas manajemen pers

## Digitalisasi

Menciptakan lingkungan demokrasi digital yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta yang mampu melibatkan masyarakat dalam **partisipasi politik yang lebih bermakna** untuk meningkatkan **kualitas dan legitimasi pengambilan keputusan politik**.

### PEMBANGUNAN POLITIK

## Demokrasi Prosedural Struktur & Proses Politik

Menyempurnakan **sistem politik** dengan memperkuat **sistem pemilu** dan **partai politik** yang mampu memperkuat **sistem presidensial**. Serta mendorong terciptanya **masyarakat sipil yang kuat dan berkelanjutan**.

Internalisasi **budaya politik** yang inklusif dengan menekankan pada **kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan pada Pancasila** sebagai falsafah hidup berbangsa.

## Demokrasi Substansial Budaya Politik



Peran  
Masyarakat  
Sipil



Kebebasan &  
kesetaraan

01

### Penguatan masyarakat sipil yang berkelanjutan

- Memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil
- Mendorong peningkatan sumberdaya bagi keberlangsungan organisasi masyarakat sipil

### Penjaminan atas kesetaraan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi

- Penguatan regulasi anti monopoli dan kebijakan afirmasi atas pemenuhan pelayanan dasar untuk kelompok marginal

### Mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang terintegrasi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan informasi bagi masyarakat

- Penguatan kerangka regulasi komunikasi publik nasional yang terstandarisasi dan terintegrasi
- Meningkatkan nilai kemanfaatan informasi publik untuk mendukung penciptaan *smart society (post-Information society)*
- Mendorong keterlibatan dan efektifitas peran media dan masyarakat untuk membentuk jaringan komunikasi publik nasional

03

02

## Struktur & Sistem Politik

04

### Perbaikan sistem kepemiluan dan kepartaian untuk memperkuat sistem presidensial

- Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemilu
- Mendorong penegakan regulasi dan sanksi yang kuat bagi pelanggaran politik uang, netralitas ASN dan politisasi isu-isu identitas pada Pemilu dan Pilkada
- Mendorong optimalisasi implementasi teknologi informasi & komunikasi sebagai penunjang proses kepemiluan
- Mendorong regulasi sistem kepartaian untuk meningkatkan efektivitas sistem presidensial

### Penguatan lembaga demokrasi

- Mendorong terwujudnya lembaga perwakilan berbasis konsep Parlemen Modern
- Perbaikan kualitas Parpol melalui penyusunan parameter kinerja dan rekrutmen politik yang lebih terbuka
- Mewujudkan program literasi politik yang mampu meningkatkan pemikiran kritis masyarakat serta mendorong partisipasi politik yang lebih bermakna

05



01

### Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional

- Mendorong keterlibatan komunitas dalam pendidikan dan kebudayaan Pancasila di masyarakat
- Meningkatkan *good governance* sebagai penerjemahan Pancasila
- Peningkatan kolaborasi dunia usaha/dunia industri dalam kebudayaan Pancasila melalui CSR

### Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

- Mendorong pendekatan dan pengembangan metode PIP di era digitalisasi
- Integrasi regulasi dan program sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antar K/L

02

## Budaya Politik

03

### Penguatan ketahanan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional

- Mendorong regulasi RUU BPIP sebagai penguatan kelembagaan Pancasila
- Penguatan *civic education* serta peran dan fungsi Forum Keragaman Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan di masyarakat
- Meningkatkan program pembumih Pancasila pada generasi muda dan program revolusi mental

### Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

- Mendorong program pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat
- Menetapkan parameter pengukuran pendidikan wawasan kebangsaan
- Menciptakan ekosistem penyiaran yang mendukung inisiatif konten-konten berbasis kelokalan dan kecintaan terhadap tanah air

04

01

### Mengurangi Kesenjangan Digital

- Penguatan literasi digital dengan fokus ke *big data literacy* dan keadaban digital
- Akselerasi SDM bidang TIK untuk aparatur dan masyarakat

### Penciptaan ekosistem informasi media digital yang sehat dan kondusif bagi masyarakat

- Mendorong transparansi dan regulasi etika penggunaan data dan teknologi digital lainnya untuk kepentingan ekonomi-politik
- Mendorong regulasi perlindungan privasi digital untuk melindungi martabat, keselamatan dan *self-determination* masyarakat
- Penguatan regulasi moderasi konten online platform yang lebih transparan, non-bias dan berimbang

02

## Demokrasi Digital

03

### Penguatan Pers dan Penyiaran digital

- Mendorong perusahaan pers yang berkelanjutan melalui diversifikasi segmentasi perusahaan pers dan perbaikan manajemen perusahaan pers
- Memastikan keadilan bisnis pers melalui *Publisher Rights* dan kompetisi yang adil
- Meningkatkan kualitas media online melalui penyusunan database dan pemeringkatan kualitas media online

### Penciptaan Ruang-Ruang Partisipasi Publik yang aman, inklusif dan efektif berbasis digital

- Sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi dan efektif
- Inisiasi kajian dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital (*AI, augmented reality*) sebagai platform partisipasi masyarakat
- Mendorong regulasi untuk menciptakan ruang publik yang aman bagi masyarakat

04



# TAHAPAN PRIORITAS



## Peningkatkan kualitas demokrasi prosedural melalui penguatan lembaga demokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.

Arah Kebijakan	Strategi
<p>1 Meningkatkan kualitas lembaga demokrasi yang ditekankan pada penguatan kapasitas lembaga perwakilan yang responsif, partai politik yang akuntabel dan birokrasi yang netral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong terwujudnya lembaga perwakilan berbasis konsep Parlemen Modern yang menitikberatkan pada transparansi, transformasi digital, dan fungsi representasi</li> <li>• Mendorong internalisasi <i>channeling</i> dan <i>tracing</i> aspirasi publik dalam proses pembuatan kebijakan</li> <li>• Mendorong terwujudnya partai politik modern yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan fungsi parpol</li> <li>• Mendorong penguatan kebijakan afirmatif yang inklusif</li> <li>• Mewujudkan program literasi politik yang mampu meningkatkan pemikiran kritis masyarakat serta mendorong partisipasi politik yang lebih bermakna</li> <li>• Mendorong inovasi pemanfaatan <i>big data</i> dalam proses pengambilan keputusan politik</li> </ul>
<p>2 Menata proses politik yang lebih menjamin hak politik masyarakat melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemilu</li> <li>• Mendorong pemutakhiran dan perlindungan data pemilih yang terintegrasi</li> <li>• Mendorong penegakan regulasi dan sanksi yang kuat bagi pelanggaran politik uang, netralitas ASN, dan politisasi isu-isu identitas (SARA) pada Pemilu dan Pilkada</li> <li>• Mendorong optimalisasi implementasi teknologi informasi &amp; komunikasi sebagai penunjang proses kepemiluan</li> </ul>
<p>3 Meningkatkan kemandirian, kualitas dan keberlanjutan masyarakat sipil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi ketersediaan sumber daya bagi OMS dan sumber pendanaan untuk melaksanakan program advokasi dan mediator partisipasi masyarakat</li> <li>• Merumuskan mekanisme yang dapat disepakati bersama untuk mendorong peningkatan kemandirian dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil</li> <li>• Memfasilitasi inisiasi pembentukan pusat-pusat pendidikan kewargaan (<i>civic education</i>).</li> </ul>
<p>4 Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik melalui standarisasi tata kelola layanan informasi berbasis teknologi informasi serta membangun sistem komunikasi publik yang cerdas dengan jaringan yang terkoneksi secara nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong integrasi layanan keterbukaan informasi publik dalam sistem pelayanan publik berbasis <i>e-government</i></li> <li>• Merevisi UU KIP dengan fokus perluasan terhadap konteks informasi publik di ranah privat, khususnya terhadap informasi publik yang menyanggung kepentingan publik</li> <li>• Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga informasi dan komunikasi masyarakat dalam komunikasi publik dengan melibatkan masyarakat sipil</li> <li>• Pembentukan sistem jaringan lembaga informasi dan komunikasi masyarakat dan jaringan media komunitas dalam komunikasi publik;</li> <li>• Penguatan standarisasi sistem tata kelola komunikasi publik di pusat dan daerah</li> </ul>

## Peningkatkan kualitas demokrasi prosedural melalui penguatan lembaga demokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.

Arah Kebijakan	Strategi
<p>5 Memperkuat ekosistem media penyiaran dan pers yang berkualitas dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat regulasi untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan premanisme terhadap jurnalis (ex: peraturan Polri)</li> <li>• Mengatur lebih tegas standarisasi upah minimum jurnalis, hak normatif (kesehatan, tenaga kerja, jam kerja 8 jam, phk sepihak) dengan memastikan kepatuhan perusahaan pers dalam mengikat kontrak dan kemitraan dengan jurnalis serta pemenuhan kebutuhan sesuai UU tenaga kerja</li> <li>• Mendorong inisiasi berbagai kebijakan untuk menyehatkan ekosistem bisnis media melalui implementasi <i>publisher rights</i> yang menekankan pada akuntabilitas <i>platform</i> digital serta non diskriminatif.</li> <li>• Mendorong regulasi untuk meningkatkan transparansi penggunaan news-algoritma oleh platform digital</li> <li>• Meningkatkan profesionalitas jurnalis melalui pelatihan jurnalis yang lebih inklusif serta penegakan sanksi atas jurnalis abal</li> <li>• Memperkuat Indeks Kualitas Siaran TV dengan berkolaborasi dengan pengiklan untuk tata kelola iklan di stasiun TV</li> <li>• Membangun ekosistem untuk mendorong dan memfasilitasi penyiaran digital lokal dan komunitas</li> <li>• Melakukan kajian mendalam dalam rangka menyusun kerangka regulasi terkait konten digital, dengan menekankan pada aspek p asar anti monopoli, standarisasi kualitas dan variasi konten serta pengembangan SDM untuk mewujudkan ekosistem bisnis konten digital yang sehat dan demokratis.</li> </ul>

## Peningkatkan kualitas demokrasi prosedural melalui penguatan lembaga demokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.

Arah Kebijakan	Strategi
<p>6 Mendorong revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman terhadap ideologi Pancasila</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kurikulum pendidikan berbasis Pancasila dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan formal dan informal</li> <li>• Menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Mendorong penyempurnaan dan sosialisasi GBHIP sebagai pedoman pembangunan nasional</li> <li>• Mendorong pembentukan peraturan mengenai penyebarluasan dan revitalisasi Pancasila.</li> <li>• Memfasilitasi pembentukan <i>center of excellence</i> revitalisasi Pancasila</li> <li>• Mengembangkan penyegaran materi dan metode sosialisasi serta pelurusan sejarah Pancasila</li> </ul>
<p>7 Menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam produk perundang-undangan, kebijakan publik, serta lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong disahkannya regulasi penguatan kelembagaan pembinaan ideologi Pancasila melalui peraturan perundangan</li> <li>• Pembinaan sistem dan tata kelola pemerintahan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</li> <li>• Mengintegrasikan dan menyinkronkan regulasi serta program sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antar K/L</li> <li>• Membangun kemitraan antara pemerintah, CSO, dunia usaha, dan media massa dalam penguatan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila</li> <li>• Menguatkan ketahanan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara</li> </ul>

## Penguatan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dengan mendorong penciptaan ruang publik yang resilien, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila, memperkuat posisi masyarakat sipil dalam proses politik.

Arah Kebijakan	Strategi
<p>1 Meningkatkan peran organisasi masyarakat sipil dalam berpartisipasi melalui penguatan regulasi yang memberikan kewenangan yang lebih inklusif dan efektif dalam proses politik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi partisipasi seluruh OMS dalam peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>• Mendorong OMS untuk melakukan advokasi dan mediasi melalui pendampingan, pemberdayaan masyarakat atau bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas masyarakat.</li> <li>• Memperkuat tata kelola partisipasi masyarakat sipil dengan memberikan porsi serta kewenangan yang lebih untuk memengaruhi keputusan-keputusan politik.</li> </ul>
<p>2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem komunikasi publik nasional berbasis teknologi otomisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otomatisasi sistem pelayanan informasi &amp; komunikasi;</li> <li>• Digitalisasi sistem pelayanan informasi dan komunikasi</li> <li>• Peningkatan kerjasama, kemitraan, dan kolaborasi dalam produksi bersama (<i>co-production</i>), penciptaan bersama (<i>co-creation</i>), dan penemuan bersama hal-hal baru (<i>co-innovation</i>) dalam komunikasi publik;</li> </ul>
<p>3 Mendorong penciptaan ekosistem ruang publik digital yang resilien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong perumusan regulasi untuk ruang publik digital untuk memastikan adanya akses yang adil, non diskriminasi, memprioritaskan keamanan publik dan privasi.</li> <li>• Memaksimalkan potensi media tradisional sebagai media sosialisasi dan partisipasi kelompok masyarakat</li> <li>• Menginisiasi ruang publik baru non komersil yang mampu memberikan kesetaraan partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik</li> <li>• Menginisiasi kajian-kajian komprehensif mengenai potensi implementasi teknologi digital seperti <i>artificial intellegent</i>, <i>augmented reality</i> dalam proses berdemokrasi di ruang publik digital</li> <li>• Menginisiasi kajian untuk perumusan kerangka kebijakan ruang digital dengan mengedepankan pada asesmen resiko terhadap potensi munculnya pelanggaran terhadap privasi dan distorsi nilai-nilai demokrasi diberbagai bentuk ruang digital masa depan.</li> </ul>



## Penguatan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dengan mendorong penciptaan ruang publik yang resilien, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila, memperkuat posisi masyarakat sipil dalam proses politik.

Arah Kebijakan	Strategi
<p><b>4</b> Mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong regulasi lebih lanjut mengenai larangan atas eksploitasi data dan “<i>surveillance system</i>” yang berlebihan yang dilakukan oleh platform digital</li> <li>• Merumuskan Kode Praktik tentang disinformasi yang menekankan pada aspek demonetisasi konten negative dan hoax, transparansi, pemberdayaan <i>fact-checking community</i>, dan sistem monitoring yang lebih efektif</li> <li>• Menyusun database dan pemeringkatan kualitas media online</li> <li>• Memaksimalkan siaran digital sebagai media sosialisasi masalah-masalah serius di masyarakat seperti informasi kebencanaan, kesehatan serta hal genting lainnya</li> <li>• Mendorong bentuk citizen journalism yang lebih efektif dengan menekankan pada kolaborasi dengan lembaga pers dan pengembangan kapasitas masyarakat agar memenuhi kaidah dan praktek-praktek jurnalisisme yang beretika</li> <li>• Memperkuat literasi digital untuk menumbuhkan pemikiran kritis masyarakat melalui <i>big data literacy</i> dan keadaban digital</li> </ul>
<p><b>5</b> Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dialog publik tentang demokrasi, Pancasila, dan wawasan kebangsaan di tingkat masyarakat, swasta, dan aparaturnegara</li> <li>• Memperkuat pusat-pusat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (<i>civic education</i>) yang menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dan melibatkan komunitas dalam pendidikan dan pembudayaan Pancasila di masyarakat</li> <li>• Mendorong terbentuknya parameter penilaian Pancasila dan wawasan kebangsaan pada aparaturnegara secara berkala</li> </ul>
<p><b>6</b> Mengembangkan kerukunan di tengah masyarakat melalui penumbuhan budaya kewargaan (<i>civic culture</i>) berbasis nilai-nilai Pancasila.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat melalui forum-forum kebangsaan di daerah dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar negara untuk menjaga pesatuan dan kesatuan bangsa</li> <li>• Meningkatkan wawasan multikultural dan fungsionalisasi pranata lokal yang mendukung upaya kerukunan antar masyarakat</li> <li>• Mendorong perumusan regulasi anti diskriminasi dan intoleransi dengan memastikan akses yang setara</li> </ul>

**Pemantapan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh, mengolah dan memanfaatkan sumber daya sosial-ekonomi melalui regulasi persaingan usaha yang sehat dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan produktif.**

Arah Kebijakan	Strategi
<p><b>1</b> Memperkuat regulasi anti monopoli terhadap sumber daya sosial ekonomi (alam dan digital) untuk memastikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memanfaatkannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginisiasi regulasi anti monopoli terhadap sumber daya digital untuk memastikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memanfaatkan data dan informasi</li> <li>• Memperkuat regulasi yang mengatur dan menjamin kesetaraan dalam ranah politik, ekonomi dan sosial</li> <li>• Memperkuat penegakan hukum atas berbagai bentuk monopoli sumber daya ekonomi</li> </ul>
<p><b>2</b> Memberikan jaminan kesetaraan akses yang adil kepada warga untuk melakukan aktivitas politik, ekonomi dan sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kepastian atas kesetaraan akses secara adil baik untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik maupun mewakili kepentingannya dalam lembaga pembuat kebijakan</li> <li>• Meningkatkan kepastian atas akses, kesempatan, fasilitas dan perlindungan yang setara dan adil untuk seluruh kegiatan dan program sosial dan ekonomi</li> </ul>
<p><b>3</b> Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan sistem berjejaring nasional yang mampu meningkatkan keterlibatan publik dalam produksi dan re-produksi data dan informasi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akurasi, obyektivitas, validitas dan reliabilitas data dan informasi publik;</li> <li>• Peningkatan keterlibatan publik dalam produksi dan re-produksi data dan informasi</li> <li>• Memfasilitasi masyarakat sipil untuk menjembatani pengembangan masyarakat melalui program-program pemberdayaan sosial-ekonomi di ruang-ruang publik yang tersedia</li> </ul>

**Pemantapan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh, mengolah dan memanfaatkan sumber daya sosial-ekonomi melalui regulasi persaingan usaha yang sehat dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan produktif.**

Arah Kebijakan	Strategi
<p><b>4</b> Memfasilitasi media konvensional untuk beradaptasi di ekosistem media digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan memfasilitasi media lokal dan komunitas untuk bekerjasama dan beraliansi untuk produksi bersama, model distribusi bersama dalam platform bersama untuk menjamin keberlanjutannya dimasa depan</li> <li>• Menyusun regulasi yang mampu mengintervensi segala bentuk persaingan tidak sehat dalam pembentukan, pengelolaan sumber daya digital penyiaran untuk memastikan keadilan dan kesempatan bagi pemain lokal untuk ambil bagian memproduksi konten digital yang berkualitas.</li> <li>• Penciptaan aggregator berita yang beragam, yang mampu mendukung fungsi forum masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas, sekaligus menyediakan saluran untuk menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan pluralisme dan kualitas berita</li> <li>• Mendorong regulasi yang mampu memastikan keamanan dan keakuratan informasi untuk menghadapi berbagai bentuk jurnalisme masa depan seperti robotic jurnalisme, AI-driven dan lainnya.</li> </ul>
<p><b>5</b> Mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perumusan sistem ekonomi dan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkuatkan kelembagaan pengelolaan SDA berlandaskan Ekonomi Pancasila</li> <li>• Mendorong penegakan regulasi dan sanksi yang kuat bagi pelanggaran konstitusi pengelolaan SDA yang tidak sejalan dengan Ekonomi Pancasila</li> <li>• Peningkatan kolaborasi dunia usaha/dunia industri dalam pembudayaan Pancasila melalui CSR</li> <li>• Mendorong dan memfasilitasi pemerataan sosial-ekonomi di masyarakat untuk kemakmuran bersama</li> </ul>

**Perwujudan demokrasi substansial berupa kepribadian dan budaya politik demokratis yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Arah Kebijakan	Strategi
<p><b>1</b> Memastikan internalisasi budaya politik ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kolaborasi seluruh aktor baik pemerintah, parlemen, partai politik dan masyarakat untuk memastikan terlaksananya pendidikan politik dan sosialisasi politik dalam mewujudkan kesadaran politik masyarakat</li> <li>• Memastikan sistem yang berkelanjutan untuk mereviu dan memperbaharui strategi pendidikan dan sosialisasi politik agar mampu adaptif, kreatif, dan fleksibel dengan perkembangan teknologi informasi yang akan memengaruhi lingkungan demokrasi</li> </ul>
<p><b>2</b> Mendorong inisiasi awal implementasi teknologi digital termutakhir untuk mendukung proses demokrasi yang lebih inklusif dan efektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginisiasi proyek pilot tentang implementasi <i>augmented reality</i> dalam proses demokrasi sebagai upaya meningkatkan hubungan antara pejabat publik, parlemen dengan konstituennya.</li> <li>• Menyusun regulasi aplikasi teknologi <i>augmented</i> dalam proses politik untuk memastikan bahwa teknologi tersebut aman dan tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental sosial masyarakat.</li> </ul>
<p><b>3</b> Memastikan keberlanjutan dari sistem komunikasi publik yang telah dibangun untuk mendukung kemandirian publik dalam pemanfaatan, produksi dan re-produksi data dan informasi sebagai komoditas ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran lembaga-lembaga komunikasi publik sebagai acuan dan sumber data dan informasi terpercaya dan produktif;</li> <li>• Peningkatan kemandirian publik dalam produksi, re-produksi, dan pemanfaatan data dan informasi sebagai komoditas ekonomi</li> </ul>

**Perwujudan demokrasi substansial berupa kepribadian dan budaya politik demokratis yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Arah Kebijakan	Strategi
<b>4</b> Memperkuat dan menjaga Pancasila sebagai <i>living ideology</i> dalam kehidupan sehari-hari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun identitas Pancasila sebagai identitas kewarganegaraan yang setara dengan identitas suku, agama, dan ras.</li><li>• Mendayagunakan secara berkelanjutan potensi, peranan, dan kontribusi masyarakat, dunia usaha, dan kelembagaan aparatur sipil dalam upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila serta kesatuan dan persatuan bangsa</li><li>• Mengembangkan diskursus Pancasila dalam dialog internasional</li></ul>
<b>5</b> Mengembangkan secara berkelanjutan inisiasi-inisiasi baru media masa depan melalui fasilitasi model-model bisnis media baru yang non-komersil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong bentuk-bentuk jurnalisme masa depan yang bebas dari ketergantungan akan iklan, dan fokus kepada <i>audience-facing</i> yang memungkinkan pembaca, pendengar, dan pemirsa untuk mendukung jurnalisme independen secara langsung.</li><li>• Membangun ekosistem penyiaran yang fleksibel dan adaptif yang mampu bersinergi dengan berbagai teknologi dan inovasi penyiaran masa depan sehingga dapat memastikan standarisasi kualitas dan demokratisasi konten.</li></ul>



# TERIMA KASIH